



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 2500-2517

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pendidikan Pemilih untuk Meningkatkan Partisipasi Generasi Z dalam Pemilu

Suardi M

Universitas Handayani Makassar

Email: [suardi@handayani.ac.id](mailto:suardi@handayani.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait dengan pemahaman pendidikan pemilih, khususnya bagi Generasi Z, mulai dari gambaran model, metode, hingga komponen masyarakat yang penting untuk dilibatkan dalam proses pendidikan pemilih karena mengingat tingginya sikap apatis Generasi Z terhadap proses politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu literature review yang terdiri atas beberapa tahapan, seperti pengumpulan, meninjau, menganalisis, dan menyintesis informasi yang ada dalam literatur yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait permasalahan yang diangkat. Hasilnya ditemukan bahwa pendidikan pemilih yang tepat bagi Generasi Z harus melibatkan pendekatan yang holistik dengan mengintegrasikan antara pengetahuan teoritis dengan pengalaman praktis. Untuk itu, model pendidikan pemilih yang tepat sangat bervariasi, tergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya di setiap negara, wilayah atau daerah sasaran, termasuk dalam hal pemilihan metode pendidikan pemilih karena harus yang mampu mendorong partisipasi aktif Generasi Z yang harus diakui membutuhkan treatment tersendiri agar keterampilan dan pengetahuan politiknya semakin menguat, serta pengalaman praktis mereka semakin relevan, sehingga penting untuk dibangun kolaborasi antara seluruh komponen masyarakat, mulai dari sekolah, organisasi pemuda, lembaga pemerintah, partai politik, media, organisasi masyarakat sipil, pemimpin muda, dan aktivis agar tercipta ekosistem yang komprehensif untuk mendukung partisipasi aktif Generasi Z dalam pemilu.

Kata Kunci: *Pendidikan, Pemilih, Partisipasi, Generasi Z, Pemilu*

## Abstract

This study aims to provide an overview of voter education understanding, particularly for Generation Z, including models, methods, and key societal components that should be involved in the voter education process, given the high level of political apathy among Generation Z. The research method used is a literature review, consisting of several stages such as collecting, reviewing, analyzing, and synthesizing relevant literature to gain a comprehensive understanding of the issue. The findings reveal that effective voter education for Generation Z must involve a holistic approach by integrating theoretical knowledge with practical experience. Therefore, the appropriate voter education model varies depending on the social, political, and cultural context of each country, region, or target area. The selection of voter education methods should also encourage the active participation of Generation Z, recognizing that they require specific treatment to strengthen their political knowledge and skills while making their practical experience more relevant. Hence, collaboration among all societal components is essential, including schools, youth organizations, government institutions, political parties, media, civil society organizations, young leaders, and activists, to create a comprehensive ecosystem that supports the active participation of Generation Z in elections.

*Keywords: Education, Voters, Participation, Generation Z, Elections*

## PENDAHULUAN

Generasi Z memiliki peran penting dalam membentuk masa depan negara mereka, dan pendidikan politik yang baik dapat memberikan mereka pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa partisipasi politik yang efektif merupakan elemen kunci dalam sistem demokrasi, sehingga dalam rangka membangun masyarakat yang demokratis dan berkelanjutan, maka menjadi penting bagi Generasi Z untuk memiliki pemahaman politik yang baik (Hermawan, 2020). Pendidikan politik yang baik akan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses politik, berkontribusi pada pembentukan kebijakan, dan menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup bangsa dan negaranya.

Pendidikan politik penting bagi Generasi Z karena dapat membantu Generasi Z dalam upayanya untuk memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi, termasuk hak-hak warga negara, pemilihan umum, kebebasan berbicara, dan kebebasan berserikat (Mujani, 2007). Pendidikan politik juga dapat membantu Generasi Z untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang isu-isu politik, seperti kebijakan publik, lingkungan, hak asasi manusia, ekonomi, dan lainnya, karena dengan memahami isu-isu

tersebut, maka berarti mereka terfasilitasi agar dapat membentuk pandangan mereka sendiri, mengembangkan kepekaan sosial, dan membuat keputusan yang lebih baik dalam pemilihan umum (Santoso, Karim & Maftuh, 2023). Selain itu, karena pendidikan politik melibatkan pembelajaran keterampilan berpikir kritis, analisis, evaluasi informasi, dan argumentasi yang rasional, yang membuat mereka dapat membuat keputusan berdasarkan fakta dan logika sehingga membuat Generasi Z akan mampu melampaui retorika politik yang dibuat oleh para politisi.

Contoh konkret dari implementasi pendidikan politik yang efektif adalah seperti simulasi pemilu di sekolah sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Madrasah Aliyah As'adiyah di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan melalui kegiatan kokurikuler Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Rahmatan Lil Alamin (P5-RA) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai proses demokrasi dan pemilu kepada para santri atau siswanya (Asadiyah Pusat, 2024). Dalam kegiatan ini, siswa diajak untuk memahami proses pemilihan umum secara langsung, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan kandidat, kampanye, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara. Dengan keterlibatan langsung dalam simulasi tersebut, siswa tidak hanya memahami teori demokrasi, tetapi juga mengalami sendiri dinamika partisipasi politik yang sehat, adil, dan bertanggung jawab.

Selain itu, pelatihan kepemimpinan politik bagi remaja dan mahasiswa juga merupakan bentuk nyata dari pendidikan politik. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai materi seperti etika kepemimpinan, komunikasi politik, manajemen organisasi, serta strategi advokasi dan kampanye isu sosial. Dengan mengikuti pelatihan semacam ini, Generasi Z akan memiliki modal yang lebih kuat untuk berperan sebagai agen perubahan, baik dalam lingkungan kampus maupun masyarakat luas. Program-program seperti "Parlemen Remaja" yang diselenggarakan oleh DPR RI atau kegiatan "Model United Nations (MUN)" di sekolah dan universitas juga memberikan ruang bagi mereka untuk mempraktikkan kemampuan diplomasi, debat, dan pengambilan keputusan kolektif, serta seperti program relawan demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Gowa untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum (Adli Aqil, 2015).

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, platform digital juga menjadi sarana efektif dalam pendidikan politik bagi Generasi Z. Saat ini telah banyak aplikasi, situs web, dan kanal media sosial yang menyediakan konten edukatif seputar politik, seperti video penjelasan mengenai sistem pemerintahan, podcast diskusi isu kebangsaan, hingga kuis interaktif seputar demokrasi. Contoh nyatanya adalah

penggunaan aplikasi "Bijak Memilih" dari KPU RI yang dirancang untuk mengedukasi pemilih pemula tentang prosedur pemilu dan pentingnya suara mereka dalam proses demokrasi (Kompas, 2024). Selain itu, inisiatif seperti kelas daring (webinar) atau e-learning politik yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat sipil, seperti Perludem atau Kawal Pemilu, juga memberikan akses mudah dan fleksibel bagi Generasi Z untuk mempelajari berbagai topik politik secara mandiri dan interaktif.

Selanjutnya, sebagaimana yang diketahui pula bahwa pendidikan politik tidak hanya berfokus pada aspek formal politik, tetapi juga melibatkan partisipasi sosial yang lebih luas, membuat Generasi Z yang teredukasi secara politik akan lebih mungkin terlibat dalam kegiatan sosial dan masyarakat sipil yang bertujuan untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat mereka, serta dapat membantu mencegah radikalisme dan ekstremisme di kalangan Generasi Z (Yusuf, Hamdi & Fitriana, 2023). Maka dari itu, dengan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sistem politik, nilai-nilai demokrasi, dan pluralisme, pendidikan politik sangat memungkinkan untuk digunakan membangun kedewasaan politik dan menumbuhkan penghargaan terhadap dialog dan toleransi yang dimotori oleh kalangan tengah yang dalam hal ini adalah Generasi Z.

Peluang-peluang tersebut, sayangnya masih belum dipahami oleh Generasi Z karena jelas terlihat bahwa dikalangan mereka masih banyak yang apatis terhadap proses politik, sebagai contoh, hasil survei Eurobarometer pada tahun 2019 yang melibatkan lebih dari 10.000 responden berusia 15–30 tahun di seluruh Uni Eropa menunjukkan bahwa hanya 34% anak muda yang merasa tertarik terhadap politik, sementara sisanya merasa kurang tertarik atau tidak tertarik sama sekali. Adapun alasan utama yang disebutkan dalam laporan tersebut mencakup kompleksitas isu politik, ketidakpercayaan terhadap politisi, dan perasaan bahwa politik tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari (European Commission, 2019).

Survei serupa yang dilakukan oleh Pew Research Center di Amerika Serikat pada tahun 2018 terhadap 920 remaja usia 13–17 tahun, menunjukkan bahwa hanya 48% Generasi Z mengikuti berita politik atau pemerintahan secara rutin, sementara selebihnya menyatakan tidak tertarik sama sekali terhadap politik. Alasan ketidaktertarikan tersebut dikaitkan dengan ketidakpercayaan terhadap sistem politik, polarisasi politik yang tajam, serta kejenuhan terhadap konflik antar partai dan elit politik (Pew Research Center, 2019). Data tersebut sangat relevan untuk Indonesia, terutama dalam hal persepsi politik sebagai sesuatu yang "kotor", rumit, dan jauh dari kebutuhan nyata generasi muda. Studi dari Akhmad, Thamrin, dan Santosa (2023) menunjukkan bahwa salah satu alasan mengapa

sebagian Generasi Z tidak menggunakan hak suaranya saat pemilu adalah karena minimnya pemahaman terhadap sistem politik, partai politik, serta kandidat yang bersaing.

Secara lebih rinci, Akhmad, Thamrin, dan Santosa (2023) melalui studinya tersebut menjelaskan bahwa faktor-faktor apatisme politik Generasi Z adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Pendidikan Politik

Minimnya edukasi politik di tingkat sekolah dan universitas menjadikan Generasi Z tidak memahami secara mendalam hak dan kewajiban politiknya.

2. Ketidakpercayaan pada Lembaga Politik

Banyak anak muda menganggap lembaga-lembaga politik seperti DPR, partai politik, maupun institusi negara sarat dengan kepentingan pribadi, korupsi, dan jarang menampung aspirasi mereka.

3. Perasaan Tidak Berdaya dalam Sistem Politik

Sebagian Generasi Z merasa bahwa suara mereka tidak akan mengubah apapun, terutama ketika melihat bahwa kebijakan publik seringkali tidak berdampak langsung pada kesejahteraan mereka.

4. Representasi Politik yang Lemah

Kurangnya representasi anak muda dalam posisi pengambilan kebijakan membuat mereka merasa tidak memiliki tempat dalam sistem politik.

5. Dominasi Isu-Elit Politik di Media Sosial

Media sosial sebagai ruang digital utama Generasi Z justru sering dipenuhi oleh narasi konflik, hoaks politik, dan drama antar tokoh politik, bukan edukasi politik substantif.

6. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Ekonomi

Kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan tekanan hidup lainnya menjadikan partisipasi politik bukan sebagai prioritas utama bagi banyak anak muda.

Melihat realita tersebut, maka menjadi sangat penting untuk mengatasi sikap apatis politik Generasi Z dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam politik. Melalui pendidikan politik, kesadaran akan masalah-masalah ini dapat ditingkatkan dan diharapkan dapat menghasilkan generasi yang lebih terlibat dan bertanggung jawab dalam membangun masa depan yang lebih baik. Apatisme politik di kalangan Generasi Z tidak boleh dipandang sebagai masalah sepele, karena terdapat banyak faktor yang berkontribusi terhadap fenomena ini, seperti kurangnya pendidikan politik, tidak adanya representasi politik yang memadai, persepsi ketidakberdayaan dalam sistem politik,

rendahnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik, serta faktor sosial dan ekonomi lainnya.

Apatisme politik yang meluas dapat berdampak serius terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Ketika generasi muda enggan berpartisipasi, maka proses politik cenderung didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang mungkin tidak merepresentasikan kepentingan publik secara luas. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya kualitas kebijakan publik karena kurangnya tekanan dari masyarakat sipil untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, absennya suara Generasi Z dalam proses politik dapat mengakibatkan lahirnya kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi kelompok usia muda, seperti isu pendidikan, pekerjaan, perubahan iklim, dan teknologi digital.

Lebih jauh lagi, jika apatisme politik dibiarkan berkembang, hal ini berpotensi memperkuat siklus ketidakpercayaan terhadap politik dan memperlemah legitimasi institusi demokrasi. Kurangnya partisipasi politik juga dapat membuka ruang bagi munculnya populisme yang eksploitatif atau bahkan radikalisme akibat frustrasi politik yang tidak tersalurkan secara konstruktif. Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai sarana peningkatan literasi politik, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter warga negara yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab. Pendidikan politik yang menasar Generasi Z harus dirancang agar kontekstual, partisipatif, dan memanfaatkan media digital sebagai alat utama untuk membangun kesadaran politik sejak dini.

Meskipun tidak semua Generasi Z di Indonesia apatis terhadap proses politik, namun tetap harus di upayakan untuk meningkatkan partisipasi politik Generasi Z dengan mencermati apa-apa saja yang menjadi kendalanya agar dapat diatasi sehingga memungkinkannya untuk dapat menggunakan hak suaranya saat pemilihan umum, sebagaimana di negara Honduras misalnya, yang sampai membuat program kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kementerian Pendidikan untuk melatih guru dalam menyelenggarakan pemilihan ketua OSIS. Melalui kegiatan itu, siswa belajar tentang demokrasi dan proses pemilihan sejak dini, yang diharapkan membentuk kebiasaan partisipasi politik di masa depan (ACE Electoral Knowledge Network, 2020). Olehnya karena itu, penting untuk diuraikan terkait pendidikan pemilih yang tepat bagi Generasi Z untuk meningkatkan partisipasinya dalam pemilihan umum di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam mengurai masalah diatas adalah review literature atau tinjauan/kajian kepustakaan, yang merupakan sebuah pendekatan dengan alurnya diawali pada pengumpulan pustaka, kemudian meninjau, menganalisis, dan menyintesis informasi yang ada dalam kajian literatur yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Secara detail dijelaskan bahwa metode ini melibatkan pencarian, pemilihan, dan evaluasi sumber atau literatur yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang masalah penelitian yang diangkat untuk diuraikan. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam studi literature ini dimulai dari 1) penentuan tujuan penelitian, 2) penentuan pertanyaan penelitian, 3) penentuan batasan pencarian, 4) melakukan pencarian literature, 5) menilai sumber literature, 6) menganalisis dan mensintesis informasi, 7) menulis atau menyusun hasil tinjauan literature, serta terakhir 8) mengutip sumber literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan politik yang tepat bagi Generasi Z harus melibatkan pendekatan yang holistik, mengintegrasikan pengetahuan teoritis dengan pengalaman praktis. Hal tersebut dianggap akan membantu Generasi Z untuk memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep politik dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam pemilu dan proses politik lainnya. Pendidikan politik yang tepat bagi Generasi Z saat ini dapat membantu mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemilu, sehingga setidaknya ada hal-hal utama yang perlu diperhatikan dalam hal pelaksanaan pendidikan politik, khususnya bagi para generasi muda, seperti pemahaman terkait dasar-dasar sistem politik, termasuk struktur pemerintahan, fungsi lembaga-lembaga politik, dan peran masing-masing dalam pengambilan keputusan politik. Mereka juga harus belajar tentang prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan pentingnya keadilan sosial.

Untuk pemahaman terkait tentang partai politik, Generasi Z perlu mempelajari perbedaan antara setiap partai politik, mulai dari ideologi yang mereka anut, dan program-program kebijakan yang mereka usung. Tidak kalah pentingnya juga adalah keterampilan analisisnya sehingga mereka harus dilatih dalam hal keterampilan analisis untuk memahami dan mengevaluasi berbagai isu politik, termasuk pembelajaran kebijakan publik, utamanya yang terkait dengan isu-isu kontemporer yang relevan, seperti lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi karena pembelajaran seperti itu akan

membantu para Generasi Z untuk memahami bagaimana kebijakan publik itu dibuat, serta bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam proses tersebut.

Selain itu, penting pula mereka dilatih dalam keterampilan sipil yang dapat membantu mereka berpartisipasi aktif dalam proses politik, seperti berbicara di depan umum, mendebat, dan berkomunikasi secara efektif, namun harus diawali dengan pendidikan tentang hak pilih sebagai hak fundamental bagi mereka dalam kehidupan yang berbangsa dan bernegara, serta perlu untuk dibiasakan melakukan praktik partisipasi aktif mereka, jadi selain pendidikan teoritis, Generasi Z juga perlu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik. Mereka dapat terlibat dalam organisasi atau gerakan pemuda, magang politik, atau kampanye politik karena hal tersebut akan memberikan mereka pengalaman yang sangat praktis tentang bagaimana politik itu bekerja dan diberdayakan untuk membuat perubahan-perubahan positif dalam kehidupannya.

Agar uraian-uraian diatas lebih praktikal, maka dijabarkan secara spesifik terkait gambaran praktis dari pendidikan politik yang tepat bagi Generasi Z agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum, mulai dari model, metode, hingga komponen-komponen masyarakat yang penting untuk dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pendidikan politik.

#### 1. Model Pendidikan Politik Generasi Z

Model pendidikan politik oleh ahli seperti Bernard Crick (2007) yang merupakan seorang ahli politik dari Inggris, mengusulkan bahwa model pendidikan politik harus yang menekankan pada pentingnya pemahaman nilai-nilai demokrasi dan kewarganegaraan. Menurutnya, pendidikan politik harus mencakup pelajaran tentang sejarah politik, institusi-institusi politik, dan keterlibatan aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan politik. Sedangkan Keith Roe (1985) yang merupakan seorang akademisi dalam pendidikan politik, mengusulkan bahwa pendekatan pendidikan politik harus yang lebih menekankan pada upaya pengembangan keterampilan dan pengetahuan politik yang praktis, sehingga menurutnya, pendidikan politik harus lebih difokuskan pada upaya keterlibatan aktif dalam politik sehari-hari, seperti partisipasi dalam pemilihan, kampanye politik, atau kegiatan advokasi.

Untuk membangun sebuah model pendidikan politik yang tepat bagi Generasi Z agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum, maka terdapat beberapa komponen yang sangat penting untuk diperhatikan seperti pendidikan kewarganegaraan,



dimana program pendidikan politik harus memasukkan komponen pembelajaran terkait kewarganegaraan. Itu mencakup pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara, karena Generasi Z harus mempelajari nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, toleransi, dan inklusi sosial. Selain itu kurikulumnya juga harus inklusif karena harus dipastikan bahwa pendidikan politik itu mencerminkan keragaman sosial, etnis, agama, dan gender. Olehnya karena itu, kurikulum harus dirancang untuk dapat memperkenalkan ke siswa tentang berbagai pandangan politik kemudian memberikan mereka kesempatan untuk berdialog dan berdiskusi tentang isu-isu kontroversial dengan menghargai perbedaan pendapat.

Selain itu, hal-hal lainnya yang penting diperhatikan dalam mengkonsep sebuah model pendidikan politik yang tepat, apalagi yang dikhususkan bagi kalangan tertentu seperti Generasi Z, diuraikan sebagaimana berikut:

1) Pendidikan Kritis dan Analitis

Pendidikan politik harus mendorong Generasi Z untuk mengembangkan keterampilan analisis dan pemikiran kritis. Mereka harus belajar mengevaluasi berbagai sumber informasi, memahami argumen politik, dan melihat melampaui retorika politik. Keterampilan ini penting agar mereka dapat membuat keputusan informasi yang berdasarkan fakta dan logika (Hafudin, 2021).

2) Pembelajaran Praktis

Selain pengetahuan teoritis, pendidikan politik harus mencakup pengalaman praktis yang memungkinkan Generasi Z berpartisipasi secara aktif. Ini bisa berupa simulasi pemilihan, diskusi kelompok, debat, kunjungan ke lembaga politik, atau partisipasi dalam kampanye politik. Pembelajaran praktis ini akan memberi mereka pengalaman nyata tentang bagaimana politik berjalan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi (Tjandraningsih dkk, 1996).

3) Penggunaan Teknologi

Dalam era digital, penting untuk memanfaatkan teknologi dan media sosial dalam pendidikan politik. Generasi Z dapat diajarkan tentang literasi digital, penggunaan media sosial secara bertanggung jawab, dan bagaimana menggunakan platform online untuk berpartisipasi dalam diskusi politik yang positif (Sulianta, 2020).

4) Advokasi Kebijakan

Pendidikan politik harus mengajarkan Generasi Z bagaimana mereka dapat berperan sebagai advokat kebijakan. Mereka harus belajar tentang cara mempengaruhi kebijakan publik, menulis surat kepada perwakilan mereka, melakukan kampanye,

dan bekerja dalam kelompok advokasi. Hal ini akan memberi mereka keterampilan untuk membawa perubahan yang mereka inginkan melalui partisipasi politik aktif (Rahman, 2016).

Hal tersebut diatas, tentunya bukanlah hal final karena perlu pemikiran lain untuk meningkatkan rancangan efektivitasnya, sehingga penting untuk dicatat bahwa model pendidikan politik yang tepat, baik untuk kalangan tertentu maupun secara umum, sangat bisa dapat bervariasi karena tergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya di setiap negara, wilayah atau daerah sasaran yang menjadi lingkungan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kiranya menjadi sangat penting untuk melibatkan pemangku kepentingan, termasuk Generasi Z itu sendiri agar tidak hanya menjadi objek, tetapi juga sebagai subjek dari penyelenggaraan pendidikan politik tersebut, mulai dalam merancang, melaksanakan, hingga saat mengevaluasi program pendidikan politik yang efektif.

## 2. Metode Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi Generasi Z

Metode pendidikan politik adalah pendekatan atau strategi yang digunakan dalam proses pendidikan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi politik individu setiap warga negara, termasuk Generasi Z. Penting diketahui bahwa ada banyak pendekatan dan metode pendidikan politik yang diusulkan oleh para ahli, sehingga tersedia begitu banyak metode yang dapat digunakan dalam proses pendidikan politik, namun untuk menetapkan pilihan metode pendidikan politik yang tepat, maka terlebih dahulu harus diperhatikan konteks, tujuan, dan peserta didik yang terlibat dalam proses pendidikan politik tersebut yang hendak dilaksanakan agar tidak hanya efektif tetapi bisa juga menjadi semakin efisien. Ahli yang dimaksud diatas seperti Paulo Freire (2014) yang merupakan seorang pendidik dan filsuf asal Brasil yang terkenal dengan teorinya tentang "pendidikan pembebasan" atau "pendidikan kritis". Berdasarkan pemikirannya, Freire menekankan pentingnya pendidikan yang membangkitkan kesadaran kritis individu terhadap realitas politik dan sosial mereka yang dapat dilakukan melalui proses dialog, refleksi kritis, dan tindakan kolektif untuk mengubah realitas politik yang dianggap bermasalah.

Maxine Greene (2010) sendiri yang merupakan seorang filsuf pendidikan Amerika Serikat yang menyumbangkan pemikiran pentingnya tentang pendidikan politik, dimana menurutnya bahwa pendidikan politik harus melibatkan imajinasi dan empati, sehingga metode pendidikan politik yang tepat untuk digunakan seperti dengan melalui seni, cerita, dan literatur dalam rangka membangkitkan emosi dan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah politik. Selain itu, John Dewey (1903) yang merupakan seorang filsuf dan

pendidik Amerika Serikat yang banyak berkontribusi dalam bidang pendidikan politik lebih menekankan pada pentingnya pengalaman langsung dan partisipasi dalam pendidikan politik. Maka Dewey mengusulkan metode pendidikan politik dengan melibatkan pembelajaran melalui proyek, diskusi kelompok, dan eksperimen sosial untuk mendorong partisipasi aktif dan refleksi kritis. Usulan metode-metode tersebut belum termasuk dari beberapa literature lainnya seperti metode-metode berikut:

1) Pembelajaran Aktif dan Kolaboratif

Fokuskan pada pembelajaran yang melibatkan Generasi Z secara aktif dan kolaboratif. Gunakan metode seperti diskusi kelompok, permainan peran, studi kasus, dan proyek kolaboratif untuk mempromosikan pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu politik dan memberi mereka kesempatan untuk berbagi perspektif dan ide (Supratiknya, 2011).

2) Simulasi Pemilihan dan Debat

Selenggarakan simulasi pemilihan atau debat di sekolah atau komunitas untuk mengajarkan Generasi Z tentang proses pemilihan dan memberi mereka kesempatan untuk berlatih berargumentasi dan mendebat. Hal ini akan membantu mereka memahami mekanisme demokrasi dan membangun keterampilan berbicara di depan umum (Latif dkk, 2014).

3) Program Magang Politik

Kolaborasi dengan partai politik, lembaga pemerintah, atau organisasi masyarakat sipil untuk menyelenggarakan program magang politik bagi Generasi Z. Ini akan memberi mereka pengalaman langsung dalam kegiatan politik, seperti pengorganisasian kampanye, pemetaan kebijakan, atau riset politik. Melalui magang ini, mereka dapat memahami secara praktis bagaimana politik bekerja dan berkontribusi secara langsung (Rahayu, 2007).

4) Pembelajaran Online

Manfaatkan teknologi digital dan platform online untuk menyediakan sumber daya pendidikan politik yang mudah diakses. Buat konten edukatif seperti video, podcast, dan modul interaktif yang menjelaskan konsep politik dan isu-isu kontemporer. Dukung juga diskusi dan kolaborasi online melalui forum atau media sosial yang memungkinkan Generasi Z berpartisipasi secara aktif dan bertukar pemikiran (Kusum, Akbar & Fitrah, 2023).

5) Kunjungan ke Lembaga Politik

Mengatur kunjungan ke lembaga politik, seperti parlemen atau kantor pemerintah setempat, agar Generasi Z dapat melihat langsung bagaimana politik dijalankan. Sediakan kesempatan untuk bertemu dengan pejabat terpilih, mendengarkan pidato atau debat, dan mengajukan pertanyaan tentang proses politik. Hal ini akan memberi mereka wawasan nyata dan membantu menghubungkan konsep teoritis dengan praktik politik sehari-hari (Ghazali, Riama & Said, 1998).

6) Pelatihan Keterampilan

Sertakan dalam pendidikan politik pelatihan keterampilan yang relevan, seperti berbicara di depan umum, menulis kebijakan, berkomunikasi secara efektif, dan manajemen kampanye. Keterampilan ini akan mempersiapkan Generasi Z untuk terlibat aktif dalam kampanye politik, menjadi pemimpin muda, atau berkontribusi dalam pembuatan kebijakan (Muslimin, 2019).

7) Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

Libatkan pemangku kepentingan seperti organisasi pemuda, lembaga pendidikan, partai politik, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan politik. Kerjasama ini akan memperkaya perspektif, memperluas jaringan, dan meningkatkan efektivitas program (Zein, 2021).

Pada dasarnya, semua metode yang tersedia tidak dapat berdiri sendiri jika hendak diukur efektivitasnya sehingga penting untuk dilakukan kombinasi metode. Inti dari pelaksanaan dan pemilihan penggunaan metode pendidikan politik harus mendorong partisipasi aktif setiap warga negara, utamanya Generasi Z yang memang harus diakui membutuhkan treatment yang tepat, termasuk pemilihan metode pelaksanaan pendidikan politik bagi mereka agar keterampilan dan pengetahuan politik semakin menguat, serta pengalaman praktis mereka semakin relevan dengan kalangan Generasi Z yang selama ini dianggap cenderung apatis terhadap kehidupan sosialnya sehingga acuh dengan aktivitas politik, jangankan sebagai politisi, bahkan sebagai voter saja, mereka masih cenderung acuh, sehingga pendekatan yang holistik dan inklusif, membuat Generasi Z lebih siapk untuk menjadi warga negara yang terlibat dan berpartisipasi dalam pemilu dan proses politik lainnya.

3. Pelibatan Komponen Masyarakat Pada Pendidikan Politik Generasi Z

Melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pendidikan politik bagi Generasi Z sangat penting untuk memastikan partisipasi aktif mereka dalam pemilu. Hal tersebut

karena komponen masyarakat, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, kelompok masyarakat, dan pemimpin masyarakat, memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konteks politik lokal, masalah yang dihadapi, dan kebutuhan masyarakat sehingga dengan melibatkan mereka dalam pendidikan politik dianggap akan membantu memastikan bahwa Generasi Z memperoleh pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual tentang politik, bukan hanya teori dan konsep secara abstrak. Selain itu, komponen masyarakat juga sering memiliki pengetahuan praktis dan pengalaman dalam hal partisipasi politik, advokasi, dan tindakan kolektif yang membuat pelibatan mereka dalam pendidikan politik akan membuat Generasi Z dapat belajar dari pengalaman nyata, mendapatkan keterampilan praktis, dan memahami proses politik melalui latihan dan simulasi yang relevan.

Alasan lainnya terkait mengapa menjadi penting melibatkan banyak komponen masyarakat dalam pendidikan politik karena dengan melibatkan komponen masyarakat dalam pendidikan politik membuat semakin memungkinkannya Generasi Z untuk membangun keterampilan sosial yang sangat penting dalam kaitannya pada proses politik, seperti komunikasi efektif, kerjasama tim, negosiasi, dan kepemimpinan. Interaksi dengan berbagai kelompok masyarakat juga membantu Generasi Z memahami keragaman pandangan politik dan memperoleh keterampilan dialog yang penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan demokratis. Secara umum, dengan melibatkan komponen masyarakat dalam pendidikan politik bagi Generasi Z, maka berarti penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat memastikan bahwa pendidikan politik tidak hanya berfokus pada teori politik semata, tetapi juga pada penerapan praktis, pemahaman kontekstual, dan pemberdayaan Generasi Z untuk berpartisipasi dalam proses politik secara efektif.

Berikut adalah beberapa komponen masyarakat yang dianggap sangat penting untuk dilibatkan dalam proses pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat atau warga negara, utamanya jika sasaran pendidikan politiknya adalah kalangan Generasi Z:

- 1) Sekolah atau Lembaga Pendidikan

Sekolah merupakan salah satu tempat utama di mana pendidikan politik dapat dilakukan. Kurikulum sekolah harus mencakup mata pelajaran yang relevan seperti kewarganegaraan, studi sosial, atau studi politik. Selain itu, lembaga pendidikan di luar sekolah seperti perguruan tinggi dan lembaga pelatihan juga dapat menyediakan program pendidikan politik yang spesifik (Rahman, 2018).

- 2) Organisasi Pemuda

Melibatkan organisasi pemuda seperti organisasi mahasiswa, klub politik pemuda, atau gerakan sosial dapat memberikan ruang bagi Generasi Z untuk belajar dan terlibat dalam politik. Organisasi-organisasi ini dapat menyelenggarakan diskusi, seminar, pelatihan, atau kegiatan lainnya yang mendukung pemahaman politik dan partisipasi aktif (Masduki, Abdurrahim & Permana, 2021).

3) Lembaga Pemerintah

Kolaborasi dengan lembaga pemerintah, seperti departemen pendidikan, lembaga pemilihan, atau lembaga khusus pendidikan politik, dapat membantu dalam menyediakan sumber daya, kurikulum, atau program pendidikan politik yang efektif. Lembaga pemerintah juga dapat menyelenggarakan program magang politik, kunjungan ke lembaga pemerintah, atau acara interaktif yang melibatkan Generasi Z (Herdiansah, 2016).

4) Partai Politik

Partai politik memiliki peran penting dalam pendidikan politik. Melibatkan partai politik dalam program pendidikan politik dapat memberikan pemahaman tentang sistem partai politik, program kebijakan, proses pembentukan kebijakan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan partai. Partai politik juga dapat menyelenggarakan pelatihan politik khusus untuk Generasi Z (Firmanzah, 2010).

5) Media Massa dan Media Sosial

Media massa dan media sosial memiliki peran besar dalam membentuk pemahaman politik Generasi Z. Melibatkan media massa dan media sosial dalam pendidikan politik dapat melalui kerja sama untuk menyebarkan informasi, mengadakan diskusi online, atau kampanye kesadaran politik. Penting untuk memastikan informasi yang disampaikan oleh media ini akurat, seimbang, dan tidak bias (Ratnamulyani & Maksudi, 2018).

6) Organisasi Masyarakat Sipil

Organisasi masyarakat sipil, seperti lembaga advokasi, LSM, atau organisasi pemuda yang fokus pada isu-isu sosial dan politik, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu kontemporer dan melibatkan Generasi Z dalam kampanye atau kegiatan lapangan yang terkait dengan politik (Fachrudin, 2006).

7) Pemimpin Muda dan Aktivistis

Melibatkan pemimpin muda dan aktivis yang berpengalaman dalam pendidikan politik dapat memberikan inspirasi dan peran model bagi Generasi Z. Pemimpin muda dan aktivis dapat berbagi pengalaman mereka, memberikan pelatihan, atau

memberikan panduan tentang bagaimana terlibat aktif dalam politik dan berpartisipasi dalam pemilu (Hesselbein & Goldsmith, 2013).

Sebagai catatan pentingnya bahwa dengan melibatkan komponen masyarakat tersebut diatas sebagaimana telah diuraikan dalam proses pendidikan politik, maka berarti kita sedang memberi kesempatan memperluas jangkauan dan dampak dari program pendidikan politik tersebut. Kolaborasi antara seluruh komponen masyarakat diatas, mulai sekolah, organisasi pemuda, lembaga pemerintah, partai politik, media, organisasi masyarakat sipil, pemimpin muda, dan aktivis dianggap akan mampu menciptakan ekosistem pendidikan politik yang komprehensif dan mendukung partisipasi aktif Generasi Z dalam pemilu sebagai input yang diharapkan, utamanya bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena potensi partisipasi aktif dalam pemilihan umum akan menjadi semakin besar yang membuat peluang melampaui target partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu semakin besar pula.

#### SIMPULAN

Pendidikan pemilih yang tepat bagi Generasi Z harus melibatkan pendekatan yang holistik dengan mengintegrasikan antara pengetahuan teoritis dengan pengalaman praktis karena hal tersebut akan membantu Generasi Z untuk memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep politik dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam pemilu dan proses politik lainnya. Untuk mencapai itu, maka model pendidikan politik yang tepat, baik untuk kalangan tertentu maupun secara umum, sangat bisa dapat bervariasi karena tergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya di setiap negara, wilayah atau daerah sasaran yang menjadi lingkungan kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pemilihan penggunaan metode pendidikan politik juga harus mampu mendorong partisipasi aktif setiap warga negara, utamanya Generasi Z yang memang harus diakui bahwa mereka membutuhkan treatment tersendiri yang tepat, termasuk pemilihan metode pelaksanaan pendidikan politik bagi mereka agar keterampilan dan pengetahuan politik semakin menguat, serta pengalaman praktis mereka semakin relevan dengan kalangan Generasi Z. Olehnya karena itu, penting untuk segera dibangun kolaborasi antara seluruh komponen masyarakat, mulai dari sekolah, organisasi pemuda, lembaga pemerintah, partai politik, media, organisasi masyarakat sipil, pemimpin muda, dan aktivis agar tercipta sebuah ekosistem pendidikan politik yang komprehensif dan mendukung partisipasi aktif Generasi Z dalam pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

- ACE Electoral Knowledge Network. (2020). Youth and elections: Civic education in schools. Retrieved from <https://aceproject.org/ace-en/topics/yt/yt40/schools>
- Akhmad, Z., Thamrin, U., & Santosa, R. (2023). Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di SMK Negeri 5 Kabupaten Bulukumba. *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 202-216.
- Aqil, M. I. A. (2015). Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014. Skripsi, UIN Alauddin Makassar.
- Asadiyah Pusat. (2024). Madrasah Aliyah As'adiyah Gelar Simulasi Pemilu melalui Project P5-RA "Suara Demokrasi". Diambil dari <https://asadiyahpusat.org/2024/08/16/madrasah-aliyah-asadiyah-gelar-simulasi-pemilu-melalui-project-p5-ra-suara-demokrasi/>.
- Crick, B. (2007). Citizenship: The political and the democratic. *British journal of educational studies*, 55(3), 235-248.
- Dewey, J. (1903). Democracy in Education. *The Elementary School Teacher*, 4(4), 193-204.
- European Commission. (2019). Flash Eurobarometer 478: How do we build a stronger, more united Europe? The views of young people. Publications Office of the European Union. <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2224>
- Fachruddin, F. (2006). Agama dan pendidikan demokrasi: pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Pustaka Alvabet.
- Firmanzah, P. D. (2010). Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning, Ideologi Politik dan Era Demokrasi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Freire, P. (2014). *Educação Como Prática da Liberdade*. Editora Paz e Terra.
- Ghazali, Z., Riama, E., & Said, Y. (1998). Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan Prawoto Mangkusasmito, Wilopo, Ahmad Subarjo. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Greene, M. (2010). Prologue to art, social imagination and action. *Journal of educational controversy*, 5(1), 2.
- Hapudin, H. M. S. (2021). Teori Belajar dan Pembelajaran: Menciptakan Pembelajaran yang Kreatif dan Efektif. Prenada Media.
- Herdiansah, A. G. (2016). Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 49-67.



- Hermawan, I. C. (2020). Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(1).
- Hesselbein, F., & Goldsmith, M. (2013). *The leader of the future 2*. Elex Media Komputindo.
- Kompas. 2024. 3 Website untuk Cek Profil, Rekam Jejak dan Visi Misi Caleg Peserta Pemilu 2024, Tentukan Pilihanmu!. Diambil dari <https://www.kompas.tv/lifestyle/484884/3-website-untuk-cek-profil-rekam-jejak-dan-visi-misi-caleg-peserta-pemilu-2024-tentukan-pilihanmu?page=all>.
- Kusum, J. W., Akbar, M. R., & Fitrah, M. (2023). *Dimensi Media Pembelajaran (Teori dan Penerapan Media Pembelajaran Pada Era Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Latif, Y., Haryatmoko, J., Nalle, V. I., Aryani, M. I., & Sutrisno, S. (2014). *Masih Perlukah Demokrasi Pancasila di Indonesia?: Prosiding Simposium Nasional Filsafat (IV: Surabaya, 8 Maret 2014)*.
- Masduki, H., Abdurohim, S., & Permana, A. (2021). *Mengasah Jiwa Kepemimpinan: Peran Organisasi Kemahasiswaan*. Penerbit Adab.
- Mujani, S. (2007). *Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama.
- Muslimin, K. (2019). *Buku ajar komunikasi politik*. Unisnu Press.
- Pew Research Center. (2019, January 17). *Generation Z looks a lot like millennials on key social and political issues*. <https://www.pewresearch.org/social-trends/2019/01/17/generation-z-looks-a-lot-like-millennials-on-key-social-and-political-issues/>
- Rahayu, R. I. (2007). *Aliansi untuk kedaulatan warga negara yang aktif*. Yappika.
- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 44-51.
- Rahman, I. N. (2016). Pengaruh civic literacy dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap partisipasi politik siswa. *Untirta Civic Education Journal*, 1(1).
- Ratnamulyani, I. A., & Maksudi, B. I. (2018). Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor. *Sosiohumaniora*, 20(2), 154-161.
- Roe, K. (1985). *Swedish youth and music: Listening patterns and motivations*.

Communication Research, 12(3), 353-362.

Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. (2023). Kajian Dinamika Demokrasi di Indonesia untuk Menjadi Tokoh Pahlawan Daerah dan Nasional RI Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 224-240.

Sulianta, F. (2020). Literasi Digital, Riset dan Perkembangannya dalam Perspektif Social Studies. Feri Sulianta.

Supratiknya, A. (2011). Merancang Program dan Modul. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Tjandraningsih, I., Sasmito, W., Munthe, R., Sp, O., Simandjuntak, A., Tigor, A., ... & Sudrajat, T. (1996). Dehumanisasi Anak Marjinal: Berbagai Pengalaman Pemberdayaan. AKATIGA.

Yusuf, R. I., Hamdi, A., & Fitriana, R. (2023). Suara Perlawanan: Bagaimana Mahasiswa Menggunakan Pembangkangan Sipil pada Unjuk Rasa Tolak Kenaikan BBM di Indonesia. *Journal of Communication Sciences (JCoS)*, 5(2), 114-125.

Zein, M. F. (2021). Adab sebelum Ilmu: Membangun Indonesia dengan Pendidikan dan Pembangunan Karakter Bangsa. Mohamad Fadhilah Zein Digital Publishing.